

MENGHADAPI KAPITALISME

Pendekatan *Eco-Sufism* dalam Gerakan Environmentalisme Islam Indonesia

Fardan Mahmudatul Imamah

LAIN Tulungagung
imamah2012@gmail.com

Abstrak

Persoalan kerusakan lingkungan dan global warming tidak hanya tentang reaksi aktivitas environmentalisme, tetapi juga berhadapan dengan tuntutan kapitalisme yang terus meminta bertambahnya kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan inilah yang mengundang eksploitasi sumber daya alam secara cepat dan menyeluruh setiap saat di berbagai tempat. Hal itu berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup dan bencana alam hingga konflik sosial. Fungsi agama sebagai sumber etika dan moral mendapatkan ruang yang tepat dan signifikan dalam menjawab persoalan di atas. Khususnya sufisme, sebagai sumber nilai-nilai keislaman dan sikap 'menahan diri' dan melihat segala sesuatu ciptaan Allah sebagai bagian dari kuasa-Nya, sehingga melahirkan tanggung jawab moral kepada lingkungan hidup dan alam semesta. Dalam tulisan ini akan menguraikan pemikiran ulang doktrin teolog environmental yang diikuti oleh pemetaan gerakan lingkungan hidup dari lingkungan muslim dalam beberapa waktu terakhir. Tujuan utama tulisan ini adalah untuk mendorong gagasan utama 'eco sufisme' melalui eco pesantren sehingga tertanam budaya menjadi muslim yang saleh adalah muslim berdedikasi terhadap lingkungan hidup.

[The issues of environmental degradation as well as global warming aren't merely about environmentalism reaction's activities, but also dealing with the

demands of capitalism that keep asking the needs of human life. The need invites exploitation of natural resources as quickly and thoroughly at any time in various places. It has an impact on the declining quality of the environment and natural disasters to social conflict. The function of religion as a source of ethics and morals get the right and significant momentum in addressing the issues described above. Sufism, in particular, as a source of Islamic values and attitudes 'restraint' and see everything created by God as part of His power, so that gave birth to its moral responsibility to the environment and the universe. This paper will elaborate the rethinking of the doctrine of environmental theologians followed by the mapping of the environmental movement of the Muslim's environment in recent time. The main purpose of this paper is to encourage the main idea of "eco-Sufism" through "eco-pesantren", so it ingrained the culture of being devout Muslims are Muslims that dedicated to the environment.]

Keywords: *eco-sufism, capitalism, pesantren, environment.*

Pendahuluan

Etika merupakan nilai-nilai yang diajarkan oleh berbagai sumber, termasuk agama. Di dalam Islam, etika tidak hanya diperuntukkan kepada manusia untuk berhubungan dengan sesamanya, tetapi etika diajarkan sebagai akhlak manusia dengan segala ciptaan Tuhan, sebagai ungkapan syukur kepada-Nya. Namun, degradasi pertimbangan etika manusia dalam proyek modernisasi membawa berbagai bencana di setiap tempat di planet ini. Agama memiliki peranan penting dalam mengembalikan kesadaran beretika manusia dalam hubungannya dengan menjaga alam dan kepentingan manusia itu sendiri.

Persoalan global warming, climate change dan bencana alam lainnya telah menunjukkan kerusakan lingkungan hidup yang sangat berat. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Bron Taylor bahwa *Globalization and capitalism focus on immediate profit for its own sake, leave no place for environmental consideration and impact on desacralization of nature.*¹ Kerusakan terjadi akibat

¹ Taylor, B. (ed.). *Encyclopedia of Religion and Nature*. (New York: Continuum, 2008).

eksploitasi sumber daya alam untuk proses pembangunan, modernisasi, kebutuhan industrialisasi dan tuntutan kapitalisme lainnya. Kapitalisme telah mendorong dan mengharuskan adanya ekspansi ke luar dalam rangka penguasaan pasar dan sumber pasokan bahan baku. Oleh karena itu, sumber daya alam dapat dieksploitasi demi kepentingan maksimalisasi laba.

Hal itu telah berlangsung lama dan berlarut-larut sehingga dampaknya semakin sulit ditanggulangi, persoalan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam juga semakin kompleks hingga menjadi konflik sosial. Di Indonesia, kasus perusakan lingkungan yang menyebabkan bencana alam terjadi setiap tahun, kebakaran hutan tahun telah mencapai 31 juta hektar sejak 1990. Berdasarkan laporan Data dan Informasi Bencana di Indonesia Badan Nasional Penanggulangan Bencana (DIBI BNPB) disebutkan hingga bulan Juni 2016, terdapat 1.092 kejadian bencana dengan 267 korban meninggal, 1.709.158 korban menderita dan mengungsi jiwa, serta 16.595 kerusakan permukiman. Kejadian tersebut terdiri dari 13,6 % bencana banjir, 16,8 % tanah longsor, 20,4 % perubahan iklim, 12,2 % kebakaran, 8,3 % kekeringan dan masih banyak bencana lainnya.²

Pada titik ini, apakah Islam bertransformasi dalam menanggapi persoalan lingkungan? Bagaimana agama mengambil peran dalam menjawab persoalan di atas? Terutama Agama Islam dan pengikutnya di Indonesia. Dalam hal ini, meskipun Foltz (2006) berpendapat Umat Islam belum cukup serius dalam menanggapi persoalan kerusakan lingkungan³, namun Monika Arnez (2014) mengungkapkan bahwa secara theologis maupun kultural, organisasi islam terbesar di Indonesia, Nahdhatul Ulama telah mensupport kegiatan environmentalism dengan berbagai cara, mulai memperbaharui dasar theologis (baik dari Al Quran dan Hadis) terkait pandangan environmentalism, pendidikan berbasis lingkungan, gerakan

² Info grafis lebih banyak dapat diakses di <http://dibi.bnpb.go.id/>.

³ Richard Foltz, Denny, F. M., dan Baharuddin, A. (ed.). *Islam and Ecology: A Bestowed Trust*. (Harvard University Press/Center for the Study, 2003)

perlindungan lingkungan hidup seperti pengelolaan sampah dan mandiri pangan. Hal-hal tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan pemerintah maupun anggota masyarakat lainnya. Hanya saja, proses globalisasi juga tidak kalah cepat dan agresif dalam meningkatkan konsumerisme manusia terhadap sumber daya alam, tuntutan kapitalisme juga tidak bisa dihindarkan.⁴

Michael Northcott (2013) menegaskan bahwa persoalan *climate change* and *global warming* sebagai dampak kapitalisme dan modernisasi tidak hanya persoalan tentang “*nature*” tetapi juga persoalan “*culture*”. Kapitalisme menyebabkan perubahan struktur relasi antara “*nature*” – “*culture*” yang mendorong pada dua prinsip pembangunan kontemporer: (1) *exploiting natural resources transform to capital (it is about how you take forest to the stock of market)* and (2) *debt based economy which creates money by loans or credits lent at compound interest*.⁵ Oleh karena itu, Herman Daly (1991) menawarkan sebuah ‘*steady state economics*’ that is:

*“An economy with constant stocks of people and artifacts, maintained at some desired, sufficient levels by low rates of maintenance through put, that is, by the lowest feasible flows of matter and energy from the first stage of production to the last stage of consumption.”*⁶

Hal itu berarti bahwa ekonomi tanpa pertumbuhan mengharuskan konsumen dan kapitalis menahan ‘keinginan’ mereka, ‘hasrat’ ‘kebutuhan’ dan akhirnya ‘keserakahan’ mereka atau nafsu untuk kekayaan dan kekuasaan. Ini adalah perjuangan moral dan spiritual, bukan hanya persoalan ekonomi dan politik. Dalam kerangka ini, peran agama Islam dalam sisi theologis dan kultural sangat dibutuhkan. Terdapat konsep sufisme, asketisme dapat menjadi aset bagi environmentalisme Islam, dengan potensi untuk membina disiplin spiritual dan memerangi godaan

⁴ Monica Arnez “Shifting Notions of Nature and Environmentalism in Indonesian Islam”, *Environmental and Climate Change in South and Southeast Asia*. (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2014).

⁵ Michael S. Northcott, *A Political Theology of Climate Change*, (Cambridge and Grand Rapids Michigan, 2013) hal. 335.

⁶ Herman Daly. *Steady-State Economics*. (Washington DC: Island Press 1991)

konsumerisme.⁷ Masyarakat Muslim Indonesia yang memiliki perhatian terhadap lingkungan telah bekerja selama bertahun-tahun oleh berbagai aktivis di dalam dan di luar organisasi massa keagamaan mereka. Dalam tulisan ini akan menguraikan pemikiran ulang doktrin teolog environmental yang diikuti oleh pemetaan gerakan lingkungan hidup dari lingkungan muslim dalam beberapa waktu terakhir. Tujuan utama tulisan ini adalah untuk mendorong gagasan utama “eco sufisme” melalui eco pesantren sehingga tertanam budaya menjadi muslim yang saleh adalah muslim berdedikasi terhadap lingkungan hidupnya.

Etika Environmentalisme, Kapitalisme dan *Eco-Sufism*

Pertanda kerusakan alam yang paling membahayakan bumi adalah *climate change*. Di level lokal, *climate change* menyebabkan tidak menentunya kondisi suatu wilayah. Misalnya, ketika sebagian besar hutan telah terbakar atau akibat proyek perluasan perkebunan, maka wilayah ini pun akan kehilangan *microclimate* yang berguna untuk mengatur cahaya matahari, hujan, and temperatur udara. Begitu juga dengan kota-kota di wilayah tropis, *become unbearably hot without high-energy air conditioning*. Bagaimana kondisi kerusakan lingkungan di Indonesia? Bagaimana proses kapitalisme di Indonesia mempengaruhi kerusakan lingkungan hingga mengakibatkan bencana di berbagai daerah?

Berdasarkan Laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)/ - Friends of The Earth Indonesia dijelaskan bahwa sektor industri ekstraktif dianggap penting bagi Indonesia sebagai sumber penerimaan negara. Antara tahun 2010-2012, sektor pertambangan dan migas menyumbang pendapatan negara sekitar 30%. Kegiatan pertambangan dan produksi migas menyumbang 11% PDB (Product Domestic Bruto) Indonesia pada tahun 2013.⁸

⁷ Taylor, B. (ed.). *Encyclopedia of Religion and Nature*. (New York: Continuum, 2008).

⁸ Akses laporan Walhi dalam bentuk pdf melalui link http://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/2015/01/OutLook-2015_Final.pdf, selanjutnya akses juga laporan Kementerian Keuangan dalam laporan grafis bentuk pdf <http://iesr.or.id/wp-content/>

Di sisi lain, aturan dan pengawasan yang ketat terhadap korporasi tidak dilakukan, khususnya yang terkait dengan korporasi besar. Hal ini tampak dalam penerapan aturan pemurnian di dalam negeri yang seharusnya telah dilakukan pada tahun 2014 berdasarkan Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, karena mendapat penentangan dari perusahaan tambang besar, seperti PT. Freeport Indonesia, aturan ini tidak diterapkan bagi perusahaan besar hingga tahun 2014 berakhir.⁹ Akibatnya, pengerukan sumber daya alam Indonesia secara besar-besaran terus terjadi dan berkonsekuensi terhadap berlanjutnya perusakan lingkungan (hutan, sungai, laut, udara, keragaman hayati) serta dampak terhadap kesehatan manusia.

Menurut Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, secara nasional mengalami pasang surut selama kurun waktu 2009—2013. Laporan IKLH menunjukkan kenaikan pada 2009-2011, yakni dari 59,79 pada tahun 2009, menjadi 61,07 pada 2010, dan naik kembali pada 2011 menjadi 65,5.¹⁰ Namun, indeks ini mengalami penurunan pada periode 2011—2013. Angka IKLH menunjukkan 64,21 pada tahun 2012 (atau turun 1,29 poin dibanding tahun sebelumnya) dan kembali menurun pada tahun 2013 menjadi hanya 63,13 (atau turun 1,08 poin daripada tahun sebelumnya) (IKLH 2013:17).¹¹

Negara Indonesia memang bukan negara penganut kapitalisme bebas, tetapi tidak mampu menghentikan persoalan eksploitasi sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan. Dijelaskan dalam Konstitusi UUD 1945 pasal 33 ayat 3:

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

uploads/Heru-Wibowo_DJA-Kemenkeu.pdf.

⁹ Walhi, *Menagih Janji Menuntut Perubahan Tinjauan Lingkungan Hidup Indonesia 2015* (Walhi: Jakarta Selatan, 2015)

¹⁰ Akses laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) melalui <http://datin.menlh.go.id/assets/berkas/Laporan-IKLH-2011signed.pdf>, h. 16

¹¹ Informasi selengkapnya di www.menlhk.go.id/download.php?file=iklh2014.pdf.

Berdasarkan UUD tersebut, pemerintah telah mengatur terkait perlindungan terhadap lingkungan sejak mulai dibentuknya Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada tahun 1978. Pada tahun 1982, peraturan perundang-undangan pertama mengenai pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia diundangkan melalui pemberlakuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyempurnaan pertama kali dilakukan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada tahun 2009, UU No. 23 Tahun 1997 diubah serta disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu penyebab dari perubahan UU ini adalah kebijakan otonomi daerah yang diperkenalkan pasca reformasi di tahun 1999. Perbedaan antara UU No. 23 Tahun 1997 dengan UU No. 32 Tahun 2009 adalah pada pengaturan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebaliknya, McCarthy menunjukkan bagaimana Indonesia menghadapi persoalan lingkunganyang sangat serius khususnya sepanjang masa kebijakan desentralisasi saat praktik illegal logging menjadi sangat banyak dan semakin akut. Menurutnya akar persoalan di atas adalah pergeseran struktur politik dan ekonomi dari pusat ke daerah.¹²

Undang-undang No. 32 tahun 2009 belum berhasil mengatur proses ‘pembangunan’ yang ramah lingkungan. Undang-undang ini tidak diikuti dengan peraturan pemerintah untuk mendukung salah satunya tindakan “*green budgeting*” dalam kebijakan anggaran daerah/negara.¹³ Indonesia adalah salah satu negara yang tidak memiliki regulasi mengatur

¹² McCarthy, J. F. “Changing to Gray: Decentralization and the Emergence of Volatile Socio-Legal Configurations in Central Kalimantan Indonesia”, *Asia Research Centre Working*, Makalah No. 101, 2004.

¹³ Faqih, A. F. (2015) “*Kajian Kebijakan Anggaran Berbasis Lingkungan (Green Budgeting) Di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*”, Disertasi, Semarang: Universitas Diponegoro.

institusi keuangan boleh atau tidak memberikan dukungan bagi proyek yang memiliki resiko lingkungan. Dengan demikian, proyek-proyek investasi beresiko lingkungan besar seperti perkebunan sawit di kawasan gambut, tambang batubara terus mendapatkan dukungan keuangan dari perbankan kendati memiliki resiko lingkungan yang besar.

Pada awal desentralisasi, justru muncul berbagai konflik berbasis lingkungan di pertambangan, seperti di wilayah pertambangan emas di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kasus terbaru yang menjadi perhatian saat ini adalah meninggalnya Salim Kancil karena perlawanannya terhadap aktivitas tambang galian C di desanya, Desa Selok Awar-awar Lumajang.¹⁴ Selain itu, gerakan 'Kartini Kendeng' melawan rencana pendirian pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Rembang. Tentu saja, masih banyak konflik agraria lainnya di berbagai wilayah Indonesia.

Masalah kerusakan lingkungan pun memicu konflik sosial, Komnas HAM menunjukkan bahwa aktor pelanggar HAM tertinggi pada tahun 2013 adalah Kepolisian, dan sektor tertinggi yang mengalami pelanggaran HAM adalah SDA/agraria. Dalam catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2014 setidaknya telah terjadi 472 konflik agraria di Indonesia dengan luas wilayah mencapai 2.860.977,07 Ha yang melibatkan 105.887 kepala keluarga. Luas wilayah konflik mencapai 5.686.322,15 Ha, dengan melibatkan lebih dari 922.781 kepala keluarga. Akibatnya tidak kurang dari 1.180 petani dikriminalisasi, 556 luka-luka dan 65 orang meninggal dunia.¹⁵

Kerusakan itu terjadi bukan hanya karena satu atau dua pihak saja, melainkan suatu struktur yang memungkinkan atau malah mendukungnya sehingga memperbaiki kerusakan saja itu tidak cukup. Ide tentang modernisasi yang diikuti dengan pembangunan ini telah membuka

¹⁴ Akses di <https://www.beritagar.id/artikel/berita/kronologi-penganiayaan-dan-pembunuhan-salim-kancil>

¹⁵ Walhi, *Menagih Janji Menuntut Perubahan Tinjauan Lingkungan Hidup Indonesia 2015*, (Walhi: Jakarta Selatan, 2015)

puluhan juta hektar lahan di Indonesia berubah menjadi perkembunan dan pertanian, tanpa pengendalian dan regulasi yang ketat. Michele Northcott (2014) menjelaskan fenomena ini sebagai '*a structure of sin*', suatu 'dosa' yang merupakan '*tendency to do wrong thing*' yang menyatu pada '*a social system or sturcture- like a corporation or a stock market*'. '*A stucture of sin*' dipahami sebagai '*an intensive to ecological destruction or decline in the welfare of the people*'.¹⁶ Sistem ini sulit untuk dirubah karena sudah menyatu dalam kebutuhan sehari - hari sebagai tuntutan dari kapitalisme atau bahkan tanpa disadari menjadi bagian dari diri kita sendiri.

Misalnya sebagai suatu persoalan di atas, berdirinya suatu pabrik, memberikan pertimbangan bahwa pabrik tersebut akan memperkerjakan masyarakat setempat sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitarnya. Namun, pada kenyataanya adalah pabrik 'mengambil' tanah warga yang seharusnya merupakan aset baik perekonomian, kebudayaan, dan sejarah masyarakat itu.

Cerita lain yang lebih sederhana, dengan keberadaan pabrik (misal pabrik makanan dan banyaknya restoran) petani 'dituntut' untuk membudidayakan udang, kemudian dalam budidaya tersebut petani harus berutang terlebih dahulu untuk membuat lokasi budidaya, yang kemudian hasil budidayanya disetorkan kepada perusahaan tertentu. Dalam hal ini, petani terikat utang secara efektif setiap tahun tanpa dapat memperbaiki kondisi ekonominya. Pihak perusahaan juga mengklaim tanah-tanah mereka dengan membelinya dan digunakan sebagai pusat budi daya. Selama sepuluh tahun 'budi daya' ini hanya bagian dari upaya pemenuhan 'kapitalisme' di bidang industri, yang oleh World Bank disebut dengan 'pembangunan'. Itulah ironi 'pembangunan' dalam budaya kapitalisme.

Frase lain yang sering kita dengar adalah 'konservasi', upaya konservasi juga terkadang disalahgunakan, 'konservasi' yang pada tujuan sebenarnya adalah kapitalisme, tidak benar-benar melakukan

¹⁶ Michael S. Northcott, *A Political Theology of Climate Change* (Cambridge and Grand Rapids Michigan, 2013)

perlindungan, tetapi *tend to take public and natural 'common' goods and turn them over to private corporations for market activities and hence deprive the people of non-monetary benefits of ecosystems and human community interactions*. Konservasi menjadi proses legitimasi untuk mengubah alam sebagai kepemilikan publik menjadi kepemilikan persoal melalui korporasi dan tujuan pemenuhan 'kebutuhan manusia' yang semakin meningkat.

Persoalan lainnya adalah 'taxes', pajak dibayarkan oleh perusahaan kepada negara untuk disalurkan kepada rakyat demi kepentingan rakyat, melalui program-program pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kegiatan sosial lainnya. Alih-alih peningkatan kesejahteraan rakyat, di beberapa kasus, perusahaan tidak membayarkan pajak mereka, belum termasuk kasus-kasus korupsi pejabat negara.

Persoalan yang disebabkan oleh bertambahnya kebutuhan manusia tidak akan mudah dicegah atau diselesaikan, bahkan jika kondisi negara tersebut dalam situasi yang terbaik. Dalam sebuah pengandaian, jika terdapat sebuah 'negara' dengan gaya 'kapitalisme' yang ideal, jika pemerintah mengizinkan sebagian hutan di Sumatera berubah menjadi perkebunan kelapa sawit, karet dan akasia yang akan digunakan untuk pabrik kertas, dan misalnya pabrik ini tidak mencemari sungai dan udara, dan pabrik-pabrik ini membayar 'upah' dan pajak, serta mengatakan kepada petani bahwa 50 % tanah mereka dapat digunakan untuk holtikultura dan perikanan. Namun tingkat kebutuhan akan terus bertumbuh dan meningkat. Michele Northcott (2014) menyatakan:

“But capitalism always looks to grow - it is an growth engine intrinsically seeking rents, profits on rents of land and labour. Agents of capital are in a constant struggle to increase stock market values, profits, debt-based money as this means a constant process of 'creative destruction' so that the people are persuaded to consume more, to get rid of unfashionable products and to replace with new ones. So without reform of capitalism itself 'sustainable'

*development is not possible*¹⁷

Peningkatan kebutuhan manusia menuntut tumbuhnya korporasi-korporasi yang akan mengeksploitasi alam. Namun, menghentikan pertumbuhan itu juga sesuatu yang mustahil, upaya mengendalikan menjadi salah satu alternatif. Berbagai macam kebijakan ramah dan memperbaiki lingkungan diselenggarakan, tetapi jika tuntutan kapitalisme tidak dikendalikan, maka upaya perlindungan bumi semakin jauh dari yang diharapkan.

Tantangan yang paling sulit menghadapi kapitalisme adalah ‘menahan diri’. Herman Daly menawarkan *‘steady state economics’* yang hampir sangat tidak mungkin dilakukan dengan tantangan manusia untuk ‘menahan diri’. Menahan diri untuk tidak bersikap berlebihan dalam mengkonsumsi kebutuhan sehari-hari. Berbagai produk berasal dari permintaan pasar dari masyarakat itu sendiri. Maka bagaimana masyarakat mampu mengendalikan diri, mengekang keinginan dalam mengkonsumsi sesuatu yang secara tidak langsung berakibat pada perusakan lingkungan akan sangat berakibat pada pertumbuhan kapitalisme. Pada titik inilah agama berperan penting dalam mendidik dan mengajarkan tentang sifat *‘zuhd’*.

Dalam etika Islam, sifat ini dalam arti moderat akan menjadi spirit muslim yang ‘soleh’ melalui kepekaannya terhadap lingkungan dan kesadaran bahwa gaya hidup sangat mempengaruhi masyarakat dan alam sekitarnya.

Eco-Sufisme: Pertarungan Melawan Godaan Konsumerisme

Puasa adalah perintah agama untuk manusia agar dapat mengekang nafsunya, disebutkan adalah Al-Quran “*Bulan Ramadhan adalah bulan bulan diturunkannya Al Qur’an. Al Quran adalah petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang baik dan yang bathil)* (Q

¹⁷ Michael S. Northcott, *A Political Theology of Climate Change*, (Cambridge and Grand Rapids Michigan, 2013)

2:183) dan Nabi Muhammad melengkapinya dengan menjelaskan bahwa Puasa adalah perintah yang lebih sulit dari jihad dalam peperangan, karena di dalam puasa yang menjadi ujian adalah diri sendiri, nafsu dan keinginan manusia yang terus meminta untuk dipenuhi. Salah satu bentuk jihad yang diperintahkan oleh agama adalah *jihad An-nafs*. Rasulullah saw.pada waktu kembali dari suatu peperangan berkata kepada para sahabatnya, “Kita kembali dari perang yang kecil (*al-jihad al-ashghar*) kepada jihad yang besar (*al-jihad al-akbar*). Oleh karena itu, beberapa ulama menyebutnya sebagai *Jihad Al Akbar* atau *the Inner Jihad*:

“It refers to the personal struggle against one’s nafs; the lower self or ego, where in a person strives to overcome temptations, carnal desires and the devil’s whisperings; striving also to internalize the Islamic teachings through acts of worship and devotion: like prayer, fasting, dhikr and almsgiving” (Abu Aaliyah, 2006)

Dalam konteks masalah lingkungan, puasa merupakan bagian dari upaya untuk ‘menahan’ yang berlebihan, yang merupakan salah satu penyebab utama dari kerusakan lingkungan. Puasa atau diet terbatas dan upaya merasakan kemiskinan secara sukarela secara langsung juga usaha dalam capaiannya mengurangi konsumsi. Puasa adalah perintah untuk menahan semua, terutama hedonisme materialistik. Oleh karena itu, efek dari puasa harus menciptakan kehidupan yang sederhana tidak hanya ekonomi tetapi juga ramah lingkungan.

Puasa yang diharapkan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan spiritualisme manusia, saat ini justru justru menjadi target pasar. Salah seorang ulama Nahdhatul Ulama A Mustofa Bisri, atau lebih dikenal dengan Gus Mus mengungkapkan kegundahannya tentang bagaimana puasa dipahami saat ini. Berbagai produk makanan dan minuman, pakaian, hingga interteinment bernuansa Ramadhan memenuhi televisi. Tingkat konsumerisme masyarakat pun meningkat seperti mendapatkan momentum. Gus Mus mengungkapkan:

“Kita mungkin akan menyadari bahwa nafsu begitu halus tersembunyi

dalam diri kita, sering berimpitan dengan kehendak mendapatkan Ridho Allah. Kita berzikir atau membaca Al Quran, misalnya tentulah dengan kehendak ingin mendapatkan Ridho-Nya. Namun, bersamaan dengan itu, sering tanpa kita sadari, nafsu justru mendorong kita untuk berlebih-lebihan, sehingga kehendak yang mulia itu malah melenceng melanggar anggar-anggar-Nya.”¹⁸ (<http://www.gusmus.net/> 13 September 2007)

Puasa menjadi salah satu contoh bagaimana ibadah yang tidak hanya mengandung unsur legal-teologis, tetapi juga memiliki unsur spiritual telah bergeser begitu jauh dengan tujuan utama. Bahkan, puasa menjadi ‘barang dagangan’ baru di tengah tuntutan kapitalisme, dari mulai waktu hingga kebutuhan pelengkapannya. Selama Ramadhan, maka akan muncul iklan di televisi yang lebih intensif, tayangan sinetron religius, produk jilbab terbaru (fashion), bahkan berbagai macam tawaran produk makanan. Hal demikian menunjukkan bahkan pemahaman terhadap agama dapat menjadi sarana untuk bertindak konsumtif yang sangat berpengaruh dengan lingkungan. Namun demikian, upaya muslim untuk berkontribusi dalam gerakan lingkungan juga mulai dirintis.

Kesadaran muslim terhadap persoalan internasional meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini, di tahun 2002 diselenggarakan World Summit on Sustainable development. Kemudian, banyak pemimpin agama menghadiri salah satu seminar internasional seperti Muslim Seven Year Action Plan (M7YAP) di Kuwait pada tahun 2008 dan disusul pada tahun 2012, Leiden Institute for Religious Studies (LIRS), Leiden University menulis laporan berjudul ‘*Globalized Eco Islam: A Survey of Global Islamic Environmentalism*. Laporan ini menyebutkan tentang pemikiran ulang Teologi Islam dalam hubungan dengan isu-isu lingkungan. Hal ini untuk membentuk Prinsip Enviromental Islam dan Etika sejak tahun 1970 sampai tahun 2000, mulai dari perintis intelektual, terlibat dengan deklarasi agama-agama dunia terkait isu-isu lingkungan, dan platform akademik .

Pelopor intellectul muslim dari krisis lingkungan dari perspektif

¹⁸ <http://www.gusmus.net/gusmus/page.php?mod=dinamis&sub=2&id=746>

Islam adalah Seyyed Hossein Nasr (1933). Dia menawarkan pendekatan filosofis sufistik tentang alam sebagai upaya untuk memahami hubungan manusia dan alam. Ketika Lyin White mengungkapkan bahwa salah satu penyebab dari krisis kerusakan lingkungan adalah paradigma agama yang mengarah pada sikap *'the anthropocentric, materialistic and exploitative attitude towards nature that had evolved in the Western world and that legitimated the dominance and exploitation of nature'* (Schwencke, 2009).¹⁹ Tesis ini menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dari di dunia sekarang telah merusak diri sendiri. Schwencke menjelaskan bahwa Nasr sepakat bahwa pemikiran modern Barat adalah akar penyebab krisis ekologis. Menurutnya, pandangan dunia tersebut pada dasarnya cacat dengan mengabaikan sifat murni manusia dan alam. Alih-alih menyalahkan agama monoteistik, Nasr berpendapat sebaliknya, bahwa seharusnya umat muslim kembali pada *'authentic religion hold valuable wisdom that may provide humanity with the keys out of the crises.'* Dalam hal ini, Ia mencoba untuk meninjau hubungan manusia dan alam yang telah banyak dipengaruhi oleh Barat dengan munculnya modernitas. Sebuah upaya pendekatan sufis-filosofis pemikiran lingkungan Islam adalah cara bagaimana Nasr menekankan kualitas 'kesucian' alam.

Dalam hubungannya manusia dengan alam, Al Quran di Al Baqarah ayat 30 menjelaskan: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat:

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Pada ayat ini sebagian besar mufasir menjelaskan tentang bahwa pentingnya manusia sebagai khalifah untuk mengatur dunia. Secara

¹⁹ Schwencke, A. M., *Globalized Eco-Islam, A Survey of Global Islamic Environmentalism*. (Leiden: Leiden Institute for Religious Studies/LIRS. 2012).

lebih luas, beberapa mufasir pula menjelaskan ayat tersebut dengan perlunya khilafah (Baedhowi, 2009)²⁰. Beberapa pengertian yang muncul adalah Allah menciptakan alam sehingga dapat digunakan untuk umat manusia, sehingga terkadang penciptaan alam semesta dipahami untuk dimaksudkan memenuhi kebutuhan manusia. Padahal perlu diingat, bahwa pandangan tersebut belum utuh, dijelaskan pula di dalam Al Quran, Allah menciptakan alam semesta untuk manusia, tidak hanya untuk dimanfaatkan, tetapi juga untuk menguji seberapa baik manusia menggunakannya (Al Baqarah: 22; Ar R'ad: 17; Al Ibrahim: 32 – 33; An Nahl 5 16 dan 80 – 81; Al Anbiya: 70). Dan lebih jauh, alam semesta juga diciptakan tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk semua makhluk. Sayangnya, pengertian tentang '*khalifah*' (successive authority) dalam ayat tersebut, justru digunakan untuk melegitimasi tindakan manusia dalam mengeksploitasi alam.

Salah satu faktor eksploitasi terhadap alam adalah pandangan tentang '*sacred*' terhadap alam semesta hilang, sebagaimana pandangan ini dipertahankan oleh masyarakat (yang dinilai) primitif oleh masyarakat modern saat ini. Agama-agama dunia, salah satunya Islam, juga ikut dalam mengubah pandangan terhadap alam semesta. Penghormatan kepada alam semesta dengan memberikan sesajen dan mensucikan pepohonan mampu menekan 'keserakahan' manusia untuk menumbangkan maupun mengeksploitasi hutan secara berlebihan. Namun, sikap tersebut lebih dipahami sebagai tindakan syirik dan kafir, kemudian menjelaskan bahkan pohon-pohon tersebut diciptakan untuk manusia, dan pantas bagi manusia untuk menggunakan seluas-luasnya demi memenuhi kebutuhan.

Roger E Timm mengkritik dalam teologi ekologis Islam, '*nada eskatologis*' yang lebih banyak digunakan sebagai argumen tindakan atau sikap seorang muslim justru memberikan implikasi yang sangat rendah terhadap pelestarian lingkungan, atau malah berakibat buruk. Dia menjelaskan agama yang mempunyai orientasi eskatologis melalaikan

²⁰ Baedhowi. *Antropologi Al-Quran*. (Yogyakarta: LKiS, 2009)

lingkungan. Karena, mengapa seseorang repot-repot menjaga kelestarian burung dan tanaman atau membersihkan sumber air, tanah, udara, bila perhatian utama religiusitas adalah untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan kemudian. Bagian yang terlupakan dalam hal ini adalah, pengadilan Allah kepada umat manusia juga termasuk tindakannya terhadap alam semesta. Karena manusia diberi kedudukan sebagai 'khalifah' adalah bagian dari ujian Allah. Bagaimana mereka memperhatikan dengan bumi yang menjadi tanggung jawab akan menentukan bagaimana baiknya mereka memenuhi harapan-harapan Allah. Iman dan tanda-tanda kesalehan seorang muslim seharusnya tidak berhenti terhadap ibadah mahdhahnya semata, sikap religiusitas juga sebaiknya tidak hanya sampai pada hubungan antara manusia kepada Allah semata, tetapi juga hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam semesta.

Keserakahan adalah sikap tidak dapat mengendalikan diri atas keinginan manusia terhadap segala hal. Mengendalikan diri ini merupakan bagian dari etika manusia agar tidak berlebihan dalam mengkonsumsi atau menggunakan segala sesuatu yang mengakibatkan kerugian baik untuk dirinya sendiri, orang lain maupun alam semesta. Kapitalisme adalah bagian dari keserakahan terstruktur dalam sistem yang telah mengglobal dan mendunia. Bagian dari keseharian manusia secara sadar maupun tidak. Dengan adanya modernisasi dan industrialisasi, alam (hutan, air, udara, tanah, dan sumber daya alam lainnya) digunakan dengan lebih mudah dan dalam jumlah besar. Hal itu dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kebutuhan yang tidak pernah berhenti inilah yang kemudian seharusnya mampu dikendalikan.

Pada titik paling rendah adalah 'keinginan manusia' sedari awal yang juga seharusnya mampu dikendalikan. Mental 'konsumeris' menjadi godaan yang selalu membayangi melalui berbagai media iklan dengan teknologi yang semakin canggih. Di titik ini, nilai-nilai agama menjadi sangat penting untuk ditanamkan, dihayati, dan dipraktikkan dalam kegiatan sehari-hari.

Salah seorang ahli ilmu lingkungan dan ekonomi di School of Public Policy of University of Maryland, Herman Daly menawarkan sebuah masyarakat '*stady state economics*' yang mengandaikan sebuah masyarakat dengan nol pertumbuhan kebutuhan adalah sesuatu yang hampir mustahil. Apalagi dengan segala produk terbaru untuk memenuhi keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan baru manusia. Katakanlah untuk kebutuhan kecantikan, jika pada sebelumnya hanya dibutuhkan bedak dan lipstik, saat ini terdapat ratusan jenis kosmetik, bahkan pada level paling minimalis dalam make up maupun perawatan. Sikap 'mengendalikan diri' sama mustahilnya dalam ruang dan waktu yang dipenuhi oleh iklan dan tawaran-tawaran produk menggiurkan lainnya. Iklan yang sebelumnya hanya sebatas di ruang publik, seperti radio, televisi, baliho, saat ini telah masuk dalam ruang-ruang privat. Sebut saja, perangkat sosial media yang dimiliki oleh masyarakat, mulai dari facebook, Whatsup, BBM, Line, Kakao, twitter dan lain-lain, iklan tidak berhenti untuk masuk dalam kehidupan anda. Tanpa disadari, berbagai produk yang sampai ke tangan anda adalah bagian dari eksploitasi alam yang terus berjalan.

Agama sebagai sumber etika dan moral manusia dalam bersikap memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk menyadari sikap berlebihan tersebut. Namun, hal demikian tidak sampai menjadi nilai maupun spirit hidup. Gaya hidup muslim modern saat ini memperlihatkan betapa kesalehan Islam diperlihatkan sebagai Islam yang fashionable dengan tuntutan kebutuhan modern pendukungnya. Hanya sedikit dari gerakan Islam yang tidak hanya secara teologis tetapi juga secara praksis memberikan kesadaran tentang pentingnya penjagaan lingkungan hidup sebagai bagian dari iman dan kewajibannya sebagai 'khalifah'. Beberapa kegiatan pelestarian lingkungan oleh kelompok keagamaan, sayangnya baru sampai pada tahap sementara, parsial dan formal. Lebih-lebih terkadang justru 'green movement' hanyalah bagian dari iklan 'kapitalisme', bahkan dalam sistem pendidikan baik formal maupun informal.

Dalam konsep sufi Islam, pengendalian diri ini dapat diterjemahkan dalam pengertian ‘*zuhd*’ yang positif dan ‘membangun’ kepribadian yang berintegritas. Dalam pengertian bahasa maupun etimologis, *zuhd* lebih dimaknai tentang ‘tidak ingin kepada sesuatu dengan meninggalkannya’, kemudian dijelaskan dengan berpaling dan meninggalkan sesuatu yang disayangi yang bersifat material atau kemewahan duniawi dengan mengharap dan menginginkan sesuatu wujud yang lebih baik dan bersifat spiritual atau kebahagiaan *akberat*. Jika dipelajari lebih dalam tentang *zuhd*, maka tidak selalu *zuhd* disamakan dengan sikap asketisme dengan meninggalkan dunia dan hidup dalam kemiskinan semata.

Abu Al Wafa’ al-Ghanimi Al Taftazani menjelaskan bahwa dalam Islam, asketisme (*zuhd*) mempunyai pengertian khusus, bukanlah kependetaan atau terputusnya kehidupan duniawi, akan tetapi *zuhd* adalah hikmah pemahaman yang membuat para penganutnya mempunyai pandangan khusus tentang kehidupan duniawi. Hendaklah seseorang menjauhkan diri dari hawa nafsunya.²¹ Pengendalian hawa nafsu ini merupakan sikap yang dapat diandalkan dalam menekan kerusakan alam. Pengendalian ‘keinginan’ secara nyata besar menyeluruh akan memberikan dampak nilai ‘kebutuhan’ dan mengurangi ‘eksploitasi’ sumber daya alam manusia.

Cara pandang manusia terhadap alam seharusnya juga dapat diluruskan melalui sufism. Dalam sudut pandang sufistik, sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat Al Quran, bahwa gunung dan burung bertasbih (Al Anbiya: 79) langit dan bumi bertasbih (al Isra 17), Asshaf 1) menunjukkan bahwa langit dan bumi adalah aktor aktif yang melakukan sesuatu ‘bertasbih’. Sebagai aktor, memiliki kehidupan, tindakan, dan hak-hak yang seharusnya dapat kita hormati. Mereka juga memperhatikan etika manusia dalam berhubungan dengan alam. Namun, karena hanya dilihat sebagai bagian dari penciptaan, mereka dilihat sebagai benda-benda

²¹ Abu al-Wafa al-Ghanimi al-Taftazani, *Sufi dari Zaman ke Zaman*, (Bandung : Pustaka, 1977).

mati, padahal batu pun ikut bertasbih. Ilmu dan teknologi modern ikut mempengaruhi tentang sikap manusia terhadap kehidupan. Meskipun terdapat banyak manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan 'keserakahan' manusia, hal-hal tersebut justru digunakan dengan cara yang salah. Sikap 'zuhd' dalam konteks pelestarian lingkungan serta menghadapi tantangan kapitalisme global menjadi jawaban.

Gerakan Environmentalisme Islam Indonesia

Kebijakan Lingkungan: Antara Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan Islam

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup mencanangkan Eco Pesantren dengan memberikan bibit tanaman di ribuan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Program bertujuan untuk mendorong peningkatan pengetahuan, kepedulian, kesadaran dan peran serta aktif warga pondok pesantren terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup berdasarkan ajaran agama Islam. Program tersebut dilatarbelakangi adanya banyak masalah lingkungan di pondok Pesantren, sanitasi yang kurang baik, dan sampah yang tidak terkelola dengan baik menjadi ancaman yang serius yang merusak lingkungan di sekitar, hal ini ditambah lagi dengan kesadaran dan perilaku warga pondok pesantren yang kurang peduli. Hal ini diperkuat oleh hasil survey BLH Jawa Timur terhadap 11 pondok pesantren di Jawa Timur, yang memberikan gambaran bahwa pondok pesantren belum mendapatkan informasi yang cukup tentang ecopesantren tetapi mengenal ecopesantren dan mengenal isu-isu lingkungan hidup namun belum diterapkan dengan baik di dalam lingkungan pondok pesantren, pengenalan tersebut hanya didapatkan melalui informasi-informasi yang terbatas, sehingga perlu intervensi pemerintah agar program dan kegiatannya dapat diterima dan diterapkan dengan baik.

Harapan lain dari program eco pesantren adalah besarnya potensi pondok pesantren di Indonesia sebagai pusat studi agama Islam, lembaga

pendidikan agama Islam paling tua. Dijelaskan Data Pondok Pesantren tahun 2011-2012 sebanyak 27.230 Pondok Pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia dengan Populasi Pondok Pesantren terbesar berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten yang berjumlah 78,60% dari jumlah seluruh Pondok Pesantren di Indonesia. Dengan rincian Jawa Barat 7.624 (28,00%), Jawa Timur 6.003 (22,05%), Jawa Tengah 4.276 (15,70%), dan Banten 3.500 (12,85%). Dan berdasarkan tipologi Pondok Pesantren, terdapat sebanyak 14.459 (53,10%) Pondok Pesantren Salafiyah, dan 7.727 (28,38%) Khalafiyah/Ashriyah, serta 5.044 (18,52%) sebagai Pondok Pesantren Kombinasi. Harapan eco-pesantren adalah agar nilai-nilai pelestarian lingkungan dapat diajarkan dan menjadi nilai-nilai kesalehan hidup umat muslim.

Kegiatan tersebut patut diapresiasi, namun seharusnya tidak hanya berhenti pada penanaman pohon dan sosialisasi. Pembentukan sikap dan keyakinan penuh bahwa seorang muslim yang salih, religious dan baik salah satunya adalah memiliki sikap mental dan kesadaran terhadap lingkungannya. Simbol penerimaan bibit pohon untuk ditanam seharusnya dilanjutkan oleh pemberdayaan lingkungan hidup di sekitarnya

Di Kalimantan Selatan, provinsi yang memiliki wilayah hutan luas di Indonesia, Kementerian Lingkungan mensosialisasikan Program Eco-Pesantren yang kurang lebih diikuti 25 pondok pesantren, sekaligus mengajak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan melakukan perumusan fatwa lingkungan hidup untuk menanggulangi permasalahan kerusakan lingkungan yang banyak terjadi di seluruh daerah di Kalimantan Selatan. Diharapkan setiap perbuatan yang merusak lingkungan hidup utamanya di Kalimantan Selatan seperti membuang sampah sembarangan, menjarah hutan, tidak ada upaya reklamasi tambang dan lain sebagainya akan mendapatkan fatwa haram dari MUI Kalimantan Selatan. Demikian juga di Riau, Madura, Bandung, Nusa Tenggara Barat dan banyak provinsi lainnya.

Salah satu program pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup adalah Eco-Pesantren. Program tersebut dimulai sejak tahun 2006, yang sebelumnya terdapat program adiwiyata yang dicanangkan 21 Februari 2006. Tercatat 17 ribu pesantren yang tersebar di Indonesia dengan jumlah siswa mencapai lima juta orang, telah mengikuti program tersebut. Hingga saat ini, terdapat tiga tahapan program, yang disosialisasikan oleh pemerintah local, seperti di NTB, Sulawesi selatan, Riau, Madura, Sumatera barat, dan lain-lain. Aktivitas tersebut meliputi pertemuan sosialisasi, lomba usulan kegiatan ramah lingkungan pendukung Eco-Pesantren, pemberian bibit pohon produktif dan copy CD Pengelolaan sampah organik. Program dibagi menjadi 3 tahap, yakni tahap pertama dan kedua sepanjang tahun 2009, dan tahap ketiga 2010. Pada 2012, juga mulai kembali kegiatan eco-esantren di Probolinggo.

Sebelumnya, Fachrufin Mangunwijaya melalui Conservational Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Obor Indonesia mengerjakan proyek 'Islamic Boarding School and Conservation' sejak Desember 2004 hingga 30 Juni 2005. Aktivitas proyek tersebut meliputi pengiriman 5.000 cetak buku 'Konservasi Alam dalam Islam' ke pesantren, pusat studi lingkungan di universitas, LSM, parlemen, departemen kehutanan dan lain-lain. Selain itu, terdapat enam pesantren yang mengikuti program konservasi hutan dan biodiversity. Program tersebut diselenggarakan tiga bulan April – Juni 2005, santri menanam 2.825 tanaman pilihan. Program ketiga adalah workshop pemimpin agama dan stakeholder. Kemudian, dilanjutkan dengan beberapa pertemuan pemimpin agama, di Buton berupa kunjungan dan dakwah Islam.

Terdapat beberapa laporan ilmiah tentang kegiatan eco pesantren, salah satunya skripsi tentang hubungan komunikasi antara pengurus ecopontren dan santri terkait kebijakan kebersihan lingkungan pondok di PP Al Ihsan Bogor, skripsi berjudul 'Pengaruh Sikap dan Norma Subyektif Mahasiswa STAIN Salatiga terhadap perilaku ramah lingkungan' ditulis oleh Navis Irhami 2012, tulisan tentang sekolah sebagai media awal

perbaikan lingkungan, laporan penanaman Mangrove oleh kalangan pesantren di Pernalang, Jawa Tengah 4 Mei 2010 hingga 4 April 2011 yang diselenggarakan oleh Mangrove for Future. Tahun 2010, diselenggarakan pertemuan OKI di Bogor menanggapi isu lingkungan yang dihadiri oleh 200 peserta, juga terdapat laporan tentang waste management di Surabaya. Pendidikan di pesantren Ath Thariq Garut, merepresentasikan fokus pendidikan islam dan kemampuan untuk mengolah lahan.

Masalahnya adalah proyek atau program eco-pesantren ini tidak mendapatkan tindaklanjut, pendampingan, maupun evaluasi efektivitas setelah mengklaim telah memberikan sosialisasi terhadap 17 ribu pesantren. Seluruh laporan yang terbaca hanya tentang kegiatan resmi sosialisasi, hampir sama dengan program pemerintah lainnya, tanpa ada evaluasi setelah 8 tahun dicanangkan. Sosialisasi eco-pesantren sebenarnya sudah banyak di berbagai tempat, juga sambutan kepala daerah setempat, sayang program tersebut –menurut saya- tidak dilakukan dengan secara kesinambungan. Memang, muncul beberapa pesantren di Jawa barat, khususnya di Bogor, Bandung, dan Garut, yang tentu berkat perjuangan Fachrudin Mangunwijaya dan tokoh-tokoh setempat yang ‘menjadikan’ eco-pesantren sebagai tren baru kurikulum dalam pendidikan islam di pesantren. Tema di berbagai tempat tersebut eco-pesantren dalam diterjemahkan sebagai penanaman pohon dan mengelola sampah khusus pada proses ‘formal’nya, tidak diteruskan dalam pembentukan sistem baru untuk memperbaiki sanitasi, pengelolaan sampah dan penanaman pada arti yang lebih berkelanjutan.

Gerakan Environmentalis Muslim Akar Rumpuk

Menurut laporan Monika Arnez (2014) menjelaskan bahwa beberapa kelompok organisasi kemasyarakatan keagamaan Islam di Indonesia mempunyai program khusus dan tindakan nyata dalam upaya pelestarian lingkungan bahkan menanggapi persoalan global warming. Khususnya dalam Organisasi Islam, Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah yang memiliki basis banyak lembaga pendidikan Islam

di Indonesia. Beberapa pesantren yang telah memiliki komitmen terhadap pelestarian lingkungan (eco pesantren) antara lain Pondok Pesantren Al Imdad Kauman Yogyakarta, yang memberikan pelatihan kepada santri tentang manajemen sampah dengan pemilihan sampah dengan proses daur ulang menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Selain itu, santri juga diajarkan untuk dekat dengan alam melalui kegiatan pertanian maupun perkebunan. Kebutuhan pangan mampu disediakan secara mandiri melalui hasil bumi yang dikelola oleh santri. Cara seperti ini yang sudah nampak ditinggalkan oleh beberapa pesantren modern. Santri mendapatkan jam pelajaran untuk mengaji maupun kegiatan keagamaan lainnya tetapi jauh dari kegiatan yang berdekatan dengan alam.

Kiai Heri, Aswaja Lintang Songo Bantul (23 Agustus 2013 dalam Monika Arnez 2013) mengungkapkan bahwa mungkin pihaknya tidak menggunakan teks maupun gerakan environmentalism pada umumnya, tetapi salah satu hal yang menunjukkan bahwa pesantren memiliki upaya maupun semangat dalam gerakan pelestarian lingkungan adalah dengan menggunakan air sisa wudhu untuk menyiram tanaman di sekitarnya.

Nahdlatul Ulama mempunyai Lembaga Penanganan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (Nahdhatul Ulama Climate Change and Disaster Management Institut) yang tujuannya mewujudkan masyarakat yang memiliki ketahanan dan adaptif terhadap bencana, menurunnya daya dukung lingkungan dan perubahan iklim. Lembaga tersebut adalah respon untuk pengembangan kesadaran maupun sikap hidup yang peka terhadap kelestarian alam dan lingkungan.

Pada perkembangan terkini, dengan semakin agresifnya gerakan eksploitasi alam oleh perusahaan-perusahaan besar, beberapa aktivis nahdliyin, membentuk Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam. Front merupakan suatu gerakan environmentaslism dengan mendampingi masyarakat korban kerusakan lingkungan. Dalam dokumennya, Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam adalah sebuah organisasi lintas jaringan yang mewadahi para aktivis dan

pemerhati agraria dan sumber daya alam di Indonesia yang datang dari latar belakang pesantren dan Nahdliyin. Organisasi ini dideklarasikan pada 8 Desember 2013 di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, hingga saat ini memiliki jaringan di lebih 10 daerah di Indonesia. Beberapa kasus yang mendapatkan pendampingan FNKSDA adalah kasus pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Tambang Emas di Lokasi Eks Hutan Lindung Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, tragedi lumpur lapindo, insiden Alastlogo, Sengkete Lahan Perhutani warga Desa Sidodadi dan Pondokrejo, Pengusiran Komunitas Syi'ah, pengusiran Nenek Asyani di Situbondo dan masih banyak lagi kasus-kasus terkait sumber daya alam lainnya.

Berdasarkan laporan Schwencke (2012) dalam *Globalized Eco-Islam A Survey of Global Islamic Environmentalism* menyebutkan beberapa bentuk aktivitas eco-Islam di Indonesia seperti:

*The active involvement of the religious establishment, the development of Fiqh al-Bi'ah (Islamic environmental Law), the active involvement of the pesantren, Islamic boarding schools, the engagement of Indonesian political movements, manifesting a merging of Islamist and environmentalists movements.*²²

Aktivitas tersebut memang mampu memberikan stimulus dalam upaya pelestarian lingkungan. Untuk tujuan yang lebih besar dalam menghadapi eksploitasi sumber daya alam maupun pelestariannya, hal demikian belum cukup. Awal persoalan tentang seriusnya kapitalisme berdampak pada kerusakan lingkungan. Melalui pendidikan dan ajaran Islam, diharapkan penanaman sikap bertanggung jawab terhadap alam menjadi bagian utuh seorang Muslim yang saleh.

Penutup

Pendekatan sufism untuk pelestarian lingkungan melalui penekanan pada pengendalian diri terhadap tantangan konsumerisme dalam kapitalisme saat ini menjadi salah satu jawaban. Sikap 'zuhd' dan kesadaran bahwa alam

²² Schwencke, A. M., (2012) *Globalized Eco-Islam, A Survey of Global Islamic Environmentalism*. Leiden: Leiden Institute for Religious Studies (LIRS).

dan seisinya adalah aktor aktif dalam keseimbangan hidup, diharapkan mampu menjadi bagian penting untuk membangun kesadaran kewajiban menjaga lingkungan. Menjadi seorang yang soleh dalam Islam berarti menginternalisasi nilai-nilai mengelola, menjaga, dan melestarikan lingkungan sesuai dengan pesan dalam ayat-ayat Al Quran sebagai 'khalifah' di bumi. Reaksi pelestarian lingkungan telah diselenggarakan dengan berbagai cara melalui eco pesantren, program pemerintah, akvitas mandiri masyarakat muslim, maupun pendidikan berbasis lingkungan. Namun demikian, kesadaran tentang 'pengendalian diri' menjadi sumber utama kekuatan manusia untuk mencegah dari 'keserakahan' dan nilai-nilai menjaga alam dan lingkungan hidup di bumi.

Daftar Pustaka

- Al-Qayyim, I. *Rawdat al-Mu'ibbin wa Nuḥbat al-Mushtaḳin*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi. 1996.
- Arnez, M. "Shifting Notions of Nature and Environmentalism in Indonesian Islam", *Environmental and Climate Change in South and Southeast Asia*. Leiden: Koninklijke Brill NV. 2014.
- Baedhowi. *Antropologi Al-Quran*. Yogyakarta: LKiS 2009.
- Daly, H. *Steady-State Economics*. Washington DC: Island Press 1991.
- Faqih, A. F. "Kajian Kebijakan Anggaran Berbasis Lingkungan (*Green Budgeting*) Di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah", *Disertasi*, Semarang: Universitas Diponegoro 2015.
- Foltz, R. C., Denny, F. M., dan Baharuddin, A. (ed.). *Islam and Ecology: A Bestowed Trust*. Harvard University Press/Center for the Study. 2003.
- Jamil, M. A. *A Study On Environmental Issues With Reference To The Qur'an And The Sunna*. Publikasi Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO). 1999.
- McCarthy, J. F. "Changing to Gray: Decentralization and the Emergence of Volatile Socio-Legal Configurations in Central Kalimantan Indonesia", *Asia Research Centre Working*, Makalah No. 101, 2004.
- McCarthy, J. F. "Turning in Circles: District Governance, Illegal Logging, and Environmental Decline in Sumatra Indonesia", *Society and Natural Resources*, Vol. 15 2002.
- Northcott, Michael S. *A Political Theology of Climate Change*, Cambridge and Grand Rapids Michigan, 2013
- Schwencke, A. M., *Globalized Eco-Islam, A Survey of Global Islamic Environmentalism*. Leiden: Leiden Institute for Religious Studies (LIRS) 2012.
- Sharif, S. *Jihad al-Nafs: the Greater Struggle*. The Jawziya Foundation. 2006
- Taylor, B. (ed.). *Encyclopedia of Religion and Nature*. New York: Continuum. 2008.
- Wainwright, J. "Climate Change, Capitalism, and the Challenge of Transdisciplinarity". *Annals of the Association of American Geographers*, Vol 100. 2010.

Internet:

http://iesr.or.id/wp-content/uploads/Heru-Wibowo_DJA-Kemenkeu.pdf.

<http://www.daulathijau.org/>

<http://www.dibi.bnph.go.id/>

<http://www.gusmus.net/gusmus/page.php?mod=dinamis&sub=2&id=746>

http://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/2015/01/OutLook-2015_Final.pdf

<https://www.beritagar.id/artikel/berita/kronologi-penganiayaan-dan-pembunuhan-salim-kancil>